

OPTIMALISASI KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR OLAH RAGA OLEH KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jayadi Prasetyo¹, Mustofa Kamil², Dafyar Eliadi H³
Program Pascasarjana Universitas Islam Syekh-Yusuf, Indonesia, 15118
E-mail Correspondent: artikelpasca@unis.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan kebijakan publik dalam pengembangan infrastruktur olahraga, dengan fokus pada implementasi pembangunan Paralympic Training Center (PTC) di Karanganyar oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan utama, termasuk pejabat Kemenpora, NPCI, Kementerian PUPR, dan masyarakat sekitar PTC. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antar lembaga dan pengawasan yang lebih efektif menjadi kunci dalam meningkatkan keberhasilan pembangunan PTC. Penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi perencanaan kebijakan olahraga di Indonesia, khususnya dalam mendukung atlet disabilitas.

Kata kunci: Kebijakan Publik, Infrastruktur Olahraga, Paralympic Training Centre, Pengembangan Olahraga Disabilitas.

Abstract

This study aims to optimize public policy regarding sports infrastructure development, focusing on the implementation of the Paralympic Training Center (PTC) project in Karanganyar by the Ministry of Youth and Sports (Kemenpora). Grounded in Law Number 11 of 2022 concerning Sports and Presidential Regulation Number 86 of 2021 concerning the Grand Design of National Sports, this research employs a qualitative method with a case study approach. Data were collected through in-depth interviews with key stakeholders, including officials from Kemenpora, the National Paralympic Committee of Indonesia (NPCI), the Ministry of Public Works and Public Housing (PUPR), and the local community surrounding the PTC. The findings indicate that inter-agency collaboration and more effective oversight are crucial to enhancing the success of the PTC development. This study makes a significant contribution to sports policy planning in Indonesia, particularly in supporting athletes with disabilities.

Keywords: Public Policy, Sports Infrastructure, Paralympic Training Center, Disability Sports Development.

A. Pendahuluan

Kenakalan Pengembangan infrastruktur olahraga di Indonesia merupakan bagian integral dari strategi pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan prestasi olahraga serta memperluas akses partisipasi masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Dalam konteks ini, kebijakan publik menjadi instrumen utama untuk menentukan arah, strategi, dan efektivitas pembangunan sarana olahraga. Optimalisasi kebijakan publik, dalam hal ini, menjadi aspek penting agar kebijakan yang telah ditetapkan tidak hanya berhenti pada tataran dokumen, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata bagi kelompok sasaran. Menurut data Kementerian Pemuda dan Olahraga, partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga masih terbilang rendah, terutama di kalangan penyandang disabilitas, yang menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih inklusif dan berorientasi pada kebutuhan mereka (Kemenpora, 2022).

Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) telah menunjukkan komitmen dalam mendukung kesetaraan akses olahraga dengan membangun Pusat Pelatihan Nasional Paralympic Committee Indonesia (Paralympic Training Center/PTC) di Karanganyar, Jawa Tengah. Pembangunan ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan tata kelola olahraga yang inklusif dan berkeadilan, serta merupakan representasi dari implementasi kebijakan afirmatif untuk atlet penyandang disabilitas. Menurut laporan dari NPCI, keberadaan PTC diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelatihan dan prestasi atlet paralimpik Indonesia di tingkat nasional maupun internasional (NPCI, 2023).

PTC Karanganyar menjadi proyek strategis karena untuk pertama kalinya Indonesia memiliki pusat pelatihan modern dan terintegrasi yang dikhususkan untuk pembinaan atlet paralimpik. Dalam konteks ini, penting untuk menyoroti bahwa fasilitas ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat pelatihan, tetapi juga sebagai simbol komitmen pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang mendukung bagi penyandang disabilitas. Pada bulan Desember 2024, fasilitas ini telah diserahterimakan meskipun belum diresmikan secara operasional. Keberadaan fasilitas ini penting, tetapi tidak cukup hanya dari sisi fisik. Optimalisasi kebijakan publik menjadi kunci agar pembangunan ini benar-benar berdampak melalui mekanisme implementasi kebijakan yang efektif, sinergi antar pemangku kepentingan, kejelasan regulasi, serta pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, penting untuk melakukan analisis mendalam terhadap kebijakan dan strategi yang diterapkan dalam pengembangan PTC Karanganyar. Hal ini mencakup pengkajian terhadap efektivitas kebijakan yang ada, tantangan yang dihadapi dalam implementasi, serta peran pemangku kepentingan dalam mendukung keberhasilan program ini. Optimalisasi kebijakan publik yang berkelanjutan akan menjadi fondasi dalam merumuskan langkah-langkah strategis yang lebih inklusif dan efektif untuk mendukung atlet penyandang disabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi pengoptimalan kebijakan publik dalam pengembangan infrastruktur olahraga di Indonesia, khususnya bagi penyandang disabilitas. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pengambil kebijakan

dan praktisi dalam merumuskan strategi yang lebih efektif dan inklusif di masa mendatang.

Dengan memanfaatkan data dan analisis yang komprehensif, diharapkan pengembangan kebijakan publik tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif dalam menciptakan ekosistem olahraga yang berkelanjutan. Melalui kolaborasi antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan komunitas, kita dapat menciptakan lingkungan yang mendukung bagi semua individu, tanpa terkecuali. Optimalisasi kebijakan publik dalam konteks ini bukan hanya sekadar jargon, tetapi merupakan tanggung jawab bersama untuk memastikan bahwa setiap orang, termasuk penyandang disabilitas, memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan berprestasi dalam olahraga.

Optimalisasi kebijakan publik bukan hanya sekadar proses administratif, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan. Dalam konteks ini, penting untuk melibatkan atlet disabilitas dalam proses perumusan kebijakan, sehingga suara dan kebutuhan mereka dapat diakomodasi dengan baik. Selain itu, kolaborasi antar kementerian menjadi kunci dalam menciptakan sinergi yang efektif, mengingat pembangunan PTC tidak hanya berkaitan dengan aspek olahraga, tetapi juga infrastruktur dan aksesibilitas. Dengan pendekatan yang komprehensif dan inklusif, diharapkan optimalisasi kebijakan publik dalam pembangunan PTC Karanganyar dapat menciptakan ekosistem olahraga yang lebih baik bagi atlet disabilitas, serta meningkatkan prestasi mereka di tingkat nasional dan internasional. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan kebijakan publik yang lebih responsif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

Melalui dialog yang konstruktif dengan para pemangku kepentingan, termasuk atlet, pelatih, dan organisasi disabilitas, pemerintah dapat menggali lebih dalam tentang tantangan yang dihadapi dan solusi yang mungkin. Ini tidak hanya akan memperkuat rasa kepemilikan masyarakat terhadap kebijakan, tetapi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan.

Dengan demikian, evaluasi kebijakan yang komprehensif dan melibatkan berbagai pihak akan menjadi fondasi yang kuat untuk optimalisasi kebijakan publik dalam pengembangan sarana pusat pelatihan NPCI. Hasil dari evaluasi ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan responsif terhadap dinamika yang ada, sehingga dapat lebih baik dalam memenuhi aspirasi dan potensi atlet penyandang disabilitas di Indonesia.

Lebih jauh lagi, optimalisasi kebijakan publik juga mencakup evaluasi berkala terhadap implementasi kebijakan. Melalui pengukuran kinerja yang jelas, pemerintah dapat mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan melakukan penyesuaian yang diperlukan. Dengan demikian, kebijakan tidak hanya menjadi dokumen statis, tetapi juga alat yang dinamis dan adaptif terhadap perubahan kondisi. Dengan menerapkan prinsip-prinsip optimalisasi kebijakan publik, diharapkan setiap kebijakan yang diambil dapat memberikan manfaat yang luas dan berkelanjutan bagi masyarakat. Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi yang pesat, penting bagi pemerintah untuk terus berinovasi dan

beradaptasi agar kebijakan yang diimplementasikan tidak hanya relevan, tetapi juga mampu menciptakan perubahan positif yang signifikan.

Kebijakan publik merupakan suatu tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mencapai tujuan tertentu. Menurut Nugroho (2003), kebijakan publik dapat dilihat sebagai suatu proses yang melibatkan perumusan, implementasi, dan evaluasi. Proses ini melibatkan berbagai aktor, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, yang berinteraksi dalam menentukan arah dan prioritas kebijakan. Dalam konteks pengembangan infrastruktur olahraga, kebijakan publik harus mampu mengakomodasi kebutuhan semua pihak, terutama dalam hal aksesibilitas dan keberlanjutan. Optimalisasi kebijakan publik menjadi suatu keharusan dalam konteks ini. Hal ini berarti bahwa kebijakan yang dihasilkan tidak hanya sekadar memenuhi tuntutan administratif, tetapi juga harus berfokus pada pencapaian hasil yang maksimal bagi masyarakat. Salah satu cara untuk mencapai optimalisasi adalah dengan melibatkan semua pemangku kepentingan dalam proses perencanaan dan evaluasi kebijakan. Dengan demikian, berbagai perspektif dan kebutuhan dapat diakomodasi, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih komprehensif dan inklusif.

Evaluasi kebijakan merupakan langkah penting untuk mengetahui sejauh mana kebijakan yang telah diimplementasikan berhasil mencapai tujuannya. Menurut Melawat (2022), evaluasi kebijakan harus dilakukan secara berkala untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari kebijakan yang diterapkan. Dalam konteks pembangunan Sarana Pusat Pelatihan NPCI, evaluasi harus mencakup aspek fisik, sosial, dan ekonomi dari infrastruktur yang dibangun. Melalui dialog yang konstruktif dengan para pemangku kepentingan, termasuk atlet, pelatih, dan organisasi disabilitas, pemerintah dapat menggali lebih dalam tentang tantangan yang dihadapi dan solusi yang mungkin. Ini tidak hanya akan memperkuat rasa kepemilikan masyarakat terhadap kebijakan, tetapi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan yang komprehensif dan melibatkan berbagai pihak akan menjadi fondasi yang kuat untuk optimalisasi kebijakan publik dalam pengembangan sarana pusat pelatihan NPCI. Hasil dari evaluasi ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan responsif terhadap dinamika yang ada, sehingga dapat lebih baik dalam memenuhi aspirasi dan potensi atlet penyandang disabilitas di Indonesia.

Dengan permasalahan tersebut diatas , maka rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana kebijakan publik dalam pembangunan Paralympic Training Center (PTC) Karanganyar dirancang dan diimplementasikan oleh Kemenpora dan kementerian terkait?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam optimalisasi kebijakan pembangunan infrastruktur olahraga disabilitas ini?
3. Bagaimana strategi optimalisasi kebijakan publik yang tepat untuk pengembangan infrastruktur olahraga disabilitas ke depan?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif fenomenologis. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana kebijakan publik terkait pembangunan Paralympic Training Center (PTC) NPCI di Karanganyar diimplementasikan, dimaknai, dan dirasakan oleh para pemangku kepentingan yang terlibat langsung. Dengan informan yang diwawancarai sebanyak 4 orang informan. Lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Pusat Pelatihan Nasional Atlet Paralimpik Indonesia (NPCI) yang terletak di Karanganyar, Jawa Tengah. Selama 8 (delapan) bulan, dari bulan Januari 2024 sd Agustus 2025.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Kebijakan publik dalam pembangunan Paralympic Training Center (PTC) Karanganyar dirancang dan diimplementasikan oleh Kemenpora dan kementerian terkait.

Dalam konteks ini, pembangunan Pusat Pelatihan Terpadu (PTC) menjadi sangat penting dan strategis. PTC ini dimaksudkan untuk menyatukan pelatihan atlet umum dan atlet disabilitas dalam satu pusat yang modern dan memenuhi standar internasional. Dengan adanya PTC, diharapkan akan tercipta lingkungan pelatihan yang lebih inklusif dan setara, di mana semua atlet, tanpa memandang kondisi fisik, memiliki akses yang sama terhadap fasilitas dan pelatihan berkualitas tinggi. Berdasarkan analisis yang dilakukan, teridentifikasi bahwa infrastruktur olahraga disabilitas yang ada saat ini masih minim dan belum memenuhi standar internasional. Hal ini berakibat pada ketidakmampuan atlet disabilitas untuk berlatih secara optimal, yang pada gilirannya mempengaruhi prestasi mereka di tingkat nasional maupun internasional. Menurut Dunn (2017), perumusan masalah adalah tahap kunci dalam analisis kebijakan yang menentukan arah dan keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Pemerintah Indonesia menyadari adanya kesenjangan fasilitas pelatihan antara atlet umum dan atlet disabilitas. Kesenjangan ini menjadi perhatian serius mengingat prestasi atlet paralimpik yang terus menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam berbagai kompetisi internasional. Namun, meskipun prestasi mereka semakin baik, kenyataannya adalah bahwa mereka masih berlatih di tempat yang terpisah, terbatas, dan kurang memenuhi standar internasional. Hal ini tentu menjadi tantangan besar bagi pengembangan olahraga disabilitas di Indonesia.

2. Keterlibatan National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) dalam pengujian kelayakan fasilitas juga merupakan langkah yang strategis. NPCI memiliki pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan atlet disabilitas, sehingga masukan mereka sangat berharga dalam memastikan bahwa fasilitas yang dibangun dapat memenuhi standar aksesibilitas dan kenyamanan. Hal ini sejalan dengan rekomendasi yang diungkapkan oleh Dwi Gansar Santi Wijayanti et al. (2016), yang menekankan pentingnya keterlibatan stakeholder dalam proses implementasi kebijakan olahraga menjadi faktor pendukung dalam implementasi kebijakan ini. Selama proses implementasi, perlu juga dilakukan monitoring dan evaluasi berkala untuk memastikan bahwa semua aspek pembangunan berjalan sesuai rencana. Data dan informasi yang dikumpulkan selama proses ini akan sangat berguna untuk

perbaikan di masa mendatang. Sebagai contoh, evaluasi awal dari fasilitas yang dibangun dapat memberikan gambaran tentang efektivitas kebijakan dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan lebih lanjut.

Salah satu tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan ini adalah masalah teknis di lapangan. Dalam beberapa proyek sebelumnya, seringkali ditemukan keterlambatan dalam proses konstruksi akibat cuaca buruk atau masalah logistik. Oleh karena itu, penting untuk memiliki rencana kontinjensi yang matang agar proses pembangunan tidak terhambat. Menurut Adnan (2014), pengelolaan proyek yang baik dan komunikasi yang efektif antara semua pihak yang terlibat dapat meminimalkan risiko keterlambatan dan memastikan bahwa proyek selesai tepat waktu.

3. Strategi optimalisasi kebijakan publik yang tepat untuk pengembangan infrastruktur olahraga disabilitas ke depan, pelatihan dan pengembangan SDM pengelola juga merupakan aspek penting dalam proses replikasi. Pengelola PTC harus memiliki kompetensi dan pemahaman yang baik tentang kebutuhan penyandang disabilitas serta manajemen fasilitas olahraga. Oleh karena itu, program pelatihan yang komprehensif perlu dirancang untuk meningkatkan kapasitas pengelola di lokasi-lokasi baru. Akhirnya, penting untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap PTC yang telah direplikasi untuk memastikan bahwa program tersebut berjalan sesuai rencana dan memberikan dampak yang positif. Data dan informasi yang diperoleh dari evaluasi ini akan sangat berguna untuk perbaikan dan pengembangan kebijakan di masa depan. Dengan demikian, jika PTC di Karanganyar berhasil, model ini tidak hanya akan memberikan manfaat bagi atlet disabilitas di daerah tersebut, tetapi juga dapat menjadi contoh bagi pengembangan olahraga disabilitas di seluruh Indonesia. Lebih jauh lagi, optimalisasi kebijakan publik juga mencakup evaluasi berkala terhadap implementasi kebijakan. Melalui pengukuran kinerja yang jelas, pemerintah dapat mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan melakukan penyesuaian yang diperlukan. Dengan demikian, kebijakan tidak hanya menjadi dokumen statis, tetapi juga alat yang dinamis dan adaptif terhadap perubahan kondisi. Dengan menerapkan prinsip-prinsip optimalisasi kebijakan publik, diharapkan setiap kebijakan yang diambil dapat memberikan manfaat yang luas dan berkelanjutan bagi masyarakat. Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi yang pesat, penting bagi pemerintah untuk terus berinovasi dan beradaptasi agar kebijakan yang diimplementasikan tidak hanya relevan, tetapi juga mampu menciptakan perubahan positif yang signifikan.

D. Kesimpulan

Kebijakan publik dalam pembangunan PTC Karanganyar dirancang melalui kolaborasi strategis antara Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dan National Paralympic Committee Indonesia (NPCI). Perencanaan dilakukan dengan mengacu pada Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) serta prinsip inklusivitas, dengan implementasi yang diawasi secara ketat hingga tahap serah terima fasilitas. Faktor pendukung meliputi dukungan politik dan kebijakan pemerintah pusat, alokasi anggaran yang memadai, peran aktif NPCI sebagai pengguna akhir, serta komitmen lintas sektor. Faktor penghambat mencakup

keterlambatan pekerjaan konstruksi, penyesuaian desain terhadap kebutuhan khusus yang memerlukan revisi, dan tantangan koordinasi antar instansi dalam pengambilan keputusan teknis. Strategi optimalisasi ke depan meliputi peningkatan koordinasi lintas kementerian, penguatan regulasi pendanaan berkelanjutan, pelatihan pengelola fasilitas, serta pengembangan panduan teknis pembangunan infrastruktur olahraga disabilitas yang dapat direplikasi di wilayah lain..

Referensi

Buku

- Dunn, W. N. (2003). *Public Policy Analysis : An Introduction (3rd, edp)*. Prentice Hall.
- Edward III, G. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Inc.
- Herlian, E, Pinata.T.S, D. T. . (2004). *Identifikasi Gejala Dekonsentrasi Pusat Pelatihan Nasional Atlet Paralimpik dengan penekanan Aksesbiiltas Arsitektur di Karanganyar*. 1.
- Johannis Siahaya. (2019). *Filsafat Ilmu: Filsafat Ilmu Hukum*. In Jakarta: Pustaka Sinar Harapan (Issue November).
- Melawat, S. H. (2022). *Pengantar Administrasi Publik*. In *Buku Ajar Pengantar Administrasi Publik*. http://eprints.uniska-bjm.ac.id/13213/1/buku_pengantar_administrasi_publik.pdf
- Nugroho, R. (2003). *Kebijakan Publik , Formulasi dan Implementasi*.
- Pradoko, A. M. S. (2015). *Paradigma Metode Penelitian Kualitatif*. 6.
- Rushananto. (2014). *Kebijakan Publik*. *Kebijakan Publik*, 1993, 15.
- Rusli, A. (2017). *Analisis Penggunaan Dana Beasiswa Berprestasi Pada Mahasiswa Pendidikan Ekonomi FKIP UNTAN*. Artikel Penelitian.
- Satispi, E., & Taufiqurokhman. (2018). *Design dalam kebijakan publik*. *Researchgate.Net*, August, 1–309.

Jurnal

- Adnan, M. F. (2014). Reformasi birokrasi pemerintahan daerah dalam upaya peningkatan pelayanan publik. *Humanus*, 12(2). <https://doi.org/10.24036/jh.v12i2.4038>
- Amali, Z. (2022). Kebijakan Olahraga Nasional Menuju Indonesia Emas Tahun 2045. *Jurnal Olahraga Pendidikan Indonesia (JOPI)*, 2(1), 63–83. <http://jopi.kemempora.go.id/index.php/jopi>
- Asis, A. (2016). Upaya Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Infrastruktur Olahraga. *Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi*, 1–23.
- Bisri, M. H., & Asmoro, B. T. (2019). Etika Pelayanan Publik di Indonesia. *Journal of Governance Innovation*, 1(1). <https://doi.org/10.36636/jogiv.v1i1.298>
- Cardoso, V. D., Haiachi, M. D. C., Santos, A. C. A. Dos, Canuto, S. C. M., & Nicoletti, L. P. (2020). Brazilian Paralympic sport initiation: The road from Rio to Los Angeles. *Journal of Human Sport and Exercise*, 15(Proc1). <https://doi.org/10.14198/jhse.2020.15.Proc1.11>
- Dianti, Y. (2017). Metode Penelitian Administrasi Publik Oleh Dr. Iwan Satibi, M.Si. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 5–24. <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB2.pdf>

- Dwi Gansar Santi Wijayanti, S. N. (2016). Pembinaan olahraga untuk penyandang disabilitas di National Paralympic Committee Salatiga. *Journal of Physical Education and Sport*, 5(1), 17–23. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jpes>
- Harahap, B. J., & Nugroho, A. (2024). Journal Management of Sport available online at <https://jurnal.stokbinaguna.ac.id/index.php/JSSB> MANAJEMEN PEMBINAAN PRESTASI OLAHRAGA TENIS MEJA Bahder Johan Harahap – Agung Nugroho, 3(1), 20–26.
- Herdiansyah, H., Sitepu, T. J., Lukman, T. R., Adviser, H., Bima, W., & Santosa, P. (2010). Mendorong Prestasi Olahraga Melalui Kebijakan Pendanaan Dan Fiskal. November, 11–14. <http://policy.paramadina.ac.id>
- Herlian, E., Pitana, T. S., & Daryanto, T. J. (2017). Pusat pelatihan nasional atlet paralimpik dengan penekanan aksesibilitas arsitektur di karanganyar. *Arsitektura*, 14(2). <https://doi.org/10.20961/arst.v14i2.9058>
- Koswara, D., Mulyadi, E., & Suhaya. (2021). Hubungan Kualitas Kepemimpinan Dan Ekspektasi Dengan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Kelurahan Ketapang Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang. *PERSPEKTIF: Jurnal Ilmu Administrasi*, 3(2), 87–95.
- Maimunah, S., Cipta, N., & Csr, P. (2025). Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial aksesibilitas inklusif : Implementasi Infrastruktur Publik ramah disabilitas di Indonesia (Sebuah litelatur Review) *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial*, 7(2), 250–276. <https://doi.org/10.24198/focus.v7i2.60851>
- Martono, B. S. (2019). Tinjauan Yuridis Administrasi Publik Dan Kebijakan Publik. *Perspektif: Jurnal Ilmu Administrasi*, 1(2), 101–111. <https://doi.org/10.33592/perspektif.v1i2.307>
- Ndaumanu, F. (2020). Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab dan Pelaksanaan oleh Pemerintah Daerah. *Jurnal HAM*, 11(1), 131. <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.131-150>
- Novinda, C., Joko Cahyono, U., & Samsudi. (2020). Prinsip aksesibilitas arsitektur Pada Pusat Pelatihan Olahraga Disabilitas Indonesia di Surakarta. *Senthong (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Arsitektur)*, 3(2), 551–560. <https://jurnal.ft.uns.ac.id/index.php/senthong/index>
- Parwata, I. W., & ; Wirya Sastrawan, I. W. (2021). Undagi : Jurnal Ilmiah Arsitektur Universitas Warmadewa. *Jurnal Ilmiah Arsitektur Universitas Warmadewa*, 9(1), 105–113. <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/undagi/index>
- Rahmawati, D., Wiyanto, A., & Setyawan, D. A. (2020). Manajemen National Paralympic Committee (NPC) dalam pembinaan prestasi atlet penyandang disabilitas. *Edu Sportivo: Indonesian Journal of Physical Education*, 1(2), 97–102. [https://doi.org/10.25299/es:ijope.2020.vol1\(2\).5661](https://doi.org/10.25299/es:ijope.2020.vol1(2).5661)
- Rahmawati, D., Wiyanto, A., & Setyawan, D. A. (2020). Manajemen National Paralympic Committee (NPC) dalam pembinaan prestasi atlet penyandang disabilitas. *Edu Sportivo: Indonesian Journal of Physical Education*, 1(2). [https://doi.org/10.25299/es:ijope.2020.vol1\(2\).5661](https://doi.org/10.25299/es:ijope.2020.vol1(2).5661)

- Saleh, H. M., Alfatih, A., Lionardo, A., & Putra, R. (2022). KEBIJAKAN PUBLIK SEKTOR OLAHRAGA “Model Pembinaan Prestasi Panahan” (Vol. 142).
- Shah, A. B., Nabhan, D., Chapman, R., Chiampas, G., Drezner, J., Olin, J. T., Taylor, D., Finnoff, J. T., & Baggish, A. L. (2021). Resumption of Sport at the United States Olympic and Paralympic Training Facilities During the COVID-19 Pandemic. *Sports Health*, 13(4), 359–363. <https://doi.org/10.1177/19417381211002761>
- Suhifatullah, M. I. (2019). Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Komunikasi Etis Aparatur Sipil Negara. *Perspektif: Jurnal Ilmu Administrasi*, 1(2), 163–173. <https://doi.org/10.33592/perspektif.v1i2.542>
- Sukatin, S., Rukmanah, S., Rosanti, R., & Karim, H. (2023). Manajemen Keuangan atau Pembiayaan Pendidikan. In *Pedagogika: Jurnal Ilmu-Ilmu Kependidikan*, 3 (2), <https://doi.org/10.57251/ped.v3i2.1374>
- Sutangsa, S. (2024). Peran Aparat Administrasi Publik dalam Pencegahan Korupsi: Suatu Analisis Perspektif. *The World of Public Administration Journal*, 5(2), 111–120. <https://doi.org/10.37950/wpaj.v5i2.1888>
- Tomu, M. F., Saman, S., & Tatura, L. (2024). Penerapan arsitektur perilaku pada perancangan pusat pelatihan olahraga disabilitas fisik di Gorontalo. *JAMBURA Journal of Architecture*, 5(2). <https://doi.org/10.37905/jjoa.v5i2.20718>
- Wahyudin, I., Dahlan, J. A., & Mulyadi, E. (2020). Hubungan Antara Kepemimpinan, Motivasi Kerja Dan Komitmen Organisasi Dengan Disiplin Kerja Aparatur Sipil Negara. *Perspektif: Jurnal Ilmu Administrasi*, 2(1), 21–40. <https://doi.org/10.33592/perspektif.v2i1.565>

Internet

- Fajri Nursyamsi, Arifianti, E. D., Aziz, M. F., Bilqish, P., & Marutama, A. (2015). Kerangka Hukum Disabilitas Indonesia. <https://www.neliti.com/publications/45395/kerangka-hukum-disabilitas-di-indonesia-menuju-indonesia-ramah-disabilitas>
- Ibrahim, Muhammad Buchori, D. (2023). Metode Penelitian Berbagai Bidang Keilmuan (Panduan & Referensi). <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=OCW2EAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=metode+penelitian+campuran&ots=XqNXCWppa8&sig=vd-PFXG63FBzf0trpLWt9FGYfbY>
- Imrie, R., & Hall, P. (2001). An Exploration of Disability and the Development Process. *Urban Studies*, 38(2), 333–350. <https://doi.org/10.1080/00420980124545> (Original work published 2001)

Peraturan

- Peraturan Presiden. (2021). Desain Besar Olahraga Nasional. Perpres No. 86, 5700. <https://www.kemempora.go.id/tag/desain-besar-olahraga-nasional>
- UU No 11 Tahun 2022. (2022). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan. Undang - Undang Nomor 11 Pasal 6, 1–89. Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2022

UU Nomor 8 Tahun 2016, T. P. D. (2016). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Undang - Undang No. 8 Tahun 2016, 85(1), 6.